

IMPLEMENTASI BUDAYA POLITIK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK

Maxi Egeten

Abstract: Now a days, the Indonesian political system is undergoing a process of democratization that brings consequences not only to the dynamics of national political life. Aim to find out how the implementation of cultural influences on political development. The population in this study is a community in the District Girian Bitung City. While samples taken from some community representatives, consisting of community leaders, religious leaders, youth leaders, Community Organizations by the number of samples taken in this study were 50 respondents. This study is a descriptive study kuaiitativ, data obtained from the results of this study are described with words representing categories to conclude, if there is data in the form of figures will be processed based on the calculation: add up, compared with the expected number and the result diprosentasikan. The results showed political cultural influences society basically make all the people to get involved in the political development and political culture of society is basically to create a civilized society.

Keywords: Political Culture and Political Development

PENDAHULUAN

Budaya politik merupakan pegangan usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada pembangunan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan politik ditujukan kepada pengembangan etika dan moral budaya politik dalam mewujudkan kehidupan politik yang mantap dengan makin berperan dan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik secara efektif, nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab; serta kesadaran dan peran serta politik masyarakat yang terus menerus dilaksanakan.

Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang

penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan system politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dewasa ini. Di samping itu, keberhasilan pembangunan system politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan

penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri.

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bidang politik dalam negeri adalah adanya ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif); belum akomodatifnya konstitusi (UUD 1945) dan perundang-undangan yang ada terhadap dinamika perubahan masyarakat; rentannya konflik, baik vertikal maupun horizontal; menguatnya gejala disintegrasi bangsa yang sering kali mencari pemberian dan dukungan dari pihak luar negeri tertentu; serta merebaknya berbagai tindak kekerasan dan aksi massa yang sering kali memaksakan kehendak. Selain itu, permasalahan lain yang muncul sebagai akibat dari warisan sistem politik pada masa lalu adalah ketidaknetralan serta keberpihakan pegawai negeri sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap kepentingan penguasa; lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara negara, sehingga menjadi penyebab meluasnya tindakan KKN; belum terlaksananya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance); lemahnya kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara, dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia; serta belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan.(Bappenas.2013)

Dalam kaitannya dengan pembangunan politik masyarakat kecamatan Girian menunjukkan kecenderungan dilihat dari sikap yang ditunjukkan yaitu keberadaan budaya politik masyarakat di kecamatan Girian lebih mengarah terhadap sikap dari masyarakat itu sendiri sehingga ciri-ciri budaya politik masyarakat di kecamatan Girian terdapat 2 ciri kebudayaan politik yaitu budaya politik toleransi dan budaya politik militan.

Menurut Kantapriwara (1988) budaya politik tidak lain dari pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Masuknya teknologi maju dan pertukaran atau kontak dengan kebudayaan luar, boleh jadi akan terjadi keadaan yang tidak harmonis atau keadaan yang mengubah kearah keseimbangan yang baru dan lebih harmonis

Bahwa untuk mengeksistensikan budaya politik terhadap pembangunan politik ada hubungan erat dengan artikulasi inspirasi masyarakat itu sendiri dengan kata lain bahwa aspirasi masyarakat tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang sedang dirasakan masyarakat adalah motif, yang mendorong mereka berpartisipasi dalam pembangunan politik.

Huntington dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989) konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, deversatif, teologis dan fungsional:

1. Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan

politik pada Negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh Negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya.

2. Pembangunan politik dalam arti derivative dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya.

3. Pembangunan politik dalam arti teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga termasuk didalamnya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. (Hungington dalam Ramlan Surbakti, 1992)

4. Pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu Negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional.

Keberadaan pembangunan politik di kecamatan Girian sangat mengarah pada kebudayaan politik yang dianut oleh masyarakat dengan kata lain sampai saat ini

pembangunan politik di kecamatan Girian bermula seiring dengan meningkatnya atau menurunnya partisipasi politik masyarakat di kecamatan Girian.

Jadi untuk mengeksistensikan budaya politik pengaruhnya terhadap pembangunan politik di kecamatan Girian butuh perubahan dari sikap budaya politik masyarakatnya, ini akan menjadi dasar dari pembangunan politik dan secara otomatis pembangunan politik masyarakat di kecamatan Girian akan lebih baik atau meningkat dari sebelumnya. Dengan mengeksistensikan budaya politik masyarakat lebih mengenal atau memahami nilai-nilai politiknya yang kemudian akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik masyarakat. Dengan demikian pembangunan politik dalam masyarakat serta dapat menyalurkan aspirasi-aspirasinya dengan benar sesuai dengan budaya politik yang dipahaminya. Dalam pelaksanaan pembangunan politik ini dapat dilihat akan makin tingginya kesadaran politik masyarakat, karena masyarakat yang telah memahami budaya politik itu dengan sendirinya bertanggung jawab akan kelangsungan pembangunan politik. Dengan kata lain budaya politik merupakan landasan pelaksanaan pembangunan politik dan juga merupakan mata rantai diantara sistem politik.

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Eksistensi Budaya Politik Pengaruhnya Terhadap

Pembangunan Politik (Suatu Studi di Kecamatan Girian Kota Bitung)"

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit yaitu objek yang akan diteliti. Objek penelitian juga disebut unit analisis, yang pada umumnya adalah orang sebagai individu sepeni kelompok, masyarakat, Kelurahan, kecamatan dan kota, Irawan (1995:57).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Girian Kota Bitung. Sedangkan sampel yang diambil dari beberapa perwakilan masyarakat, yang terdiri dari tokoh Masyarakat, tokoh Agama, tokoh Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan dengan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 50 orang responden. Adapun pengambilan sampel menggunakan purposif sampel yaitu memilih dengan sengaja sampel berdasarkan pertimbangan bahwa mereka yang dipilih adalah mereka yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat dua variabel, masing-masing : (1) variabel bebas, yaitu eksistensi budaya politik; sedangkan variabel terikat, yaitu pembangunan politik.

Adapun definisi operasional dari kedua variabel diatas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Variabel bebas, eksistensi budaya politik didefinisikan sebagai suatu sikap dan orientasi yang khas dari masyarakat di dalam sistem, dimana budaya politik diartikan sebagai perasaan-perasaan, sikap-sikap dan perilaku yang bersumber dari nilai-nilai atau norma-norma adat istiadat.
- b. Variabel terikat, yaitu pembangunan politik didefinisikan sebagai suatu mobilitas dan partisipasi masyarakat yang diarahkan dalam kehidupan bermasyarakat yang saling mempengaruhi serta mendukung akan kehidupan berbangsa yang baik.

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner atau daftar pertanyaan dan dibantu dengan pedoman wawancara (interview guide) untuk menjaring data primer. Adapun data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi dan semua data dikumpulkan dengan menggunakan teknik sun/ei dan observasi langsung.

D. Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuatif, data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digambarkan dengan kalimat mewakili kategori untuk disimpulkan, apabila ada data yang berupa angka-angka hasil perhitungan akan diproses berdasarkan: dijumlahkan, dibandingkan

dengan jumlah yang diharapkan dan hasilnya diprosentasekan.

Arikunto (1998) menyebutkan bahwa dengan teknik deskriptif kualitatif dengan prosentase, pencarian prosentase dimaksudka untuk mengetahui status sesuatu yang diprosentasekan itu dan disajikan tetap dalam bentuk prosentase. Dengan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dimana

P = Prosentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Budaya Politik Terhadap Pembangunan Politik

Budaya politik dapat dilihat dari adanya ikatan primodialisme, dan dapat didefinisikan sebagai hubungan Kekerabatan yang erat berdasarkan garis keturunan yang dimaksud yaitu: keturunan yang berasal dari keluarga: ibu, bapak, kakek, nenek, dan moyang yang semuanya terhimpun menjadi suatu masyarakat yang besar dalam suatu wilayah.

Sehingga dalam kehidupan masyarakat nampak adanya suatu kerjasama, sikap sosial yang tinggi untuk saling membantu dalam pelaksanaan pembangunan politik.

Model budaya semacam di atas telah ada pada masyarakat yang ada di Kecamatan Girian semenjak dulu, dan keturunan ini telah ada dalam masyarakat, dimana telah dibentuk kerukunan-kerukunan keluarga baik yang

berskala kecil (keluarga berdasarkan marga) maupun keluarga yang berskala besar yang semuanya terhimpun dalam suatu masyarakat.

Kerukunan keluarga ini mempunyai manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakat, Aseperti dapat menolong sesama anggota keluarga. Dalam kaitannya dengan pembangunan politik dalam menunjang pembangunan nasional, masyarakat Kecamatan Girian turut memberikan andil di dalamnya dimana dalam pelaksanaan pemilihan umum masyarakat begitu antusias untuk menyalurkan aspirasi dalam memilih wakil-wakil rakyat, baik yang duduk di DPR Pusat maupun DPRD Propinsi maupun DPRD Kota.

Peningkatan partisipasi politik bagi generasi muda dalam mensukseskan pemilihan umum dipengaruhi oleh budaya politik atau ikatan primodal yang kuat serta berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ada tokoh politik yang merupakan figur dalampartai politik secara otomatis dapat mempengaruhi masyarakat untuk memberikan dukungan politik kepada partai politik yang dipimpin, yang berusaha untuk meyakinkan masyarakat kepada pemimpin mereka dapat mendorong untuk mendukung pemimpin mereka baik di kecamatan dan ditingkat yang lebih tinggi. Karena ada harapan kalau dukungan masyarakat tersebut berhasil atau menang maka nasib masyarakat dapat lebih diperhatikan.

Berdasarkan data penelitian dalam table diatas tentang hubungan antara Budaya

politik dari 50 responden yang menjadi sampel berada 2 responden atau 4% responden yang menyatakan bahwa masyarakat yang memeluk budaya politik parokial memiliki pembangunan politik tidak berkembang karena masyarakat tidak mengaharapkan apapun dari sistem politik, misalnya: masyarakat bersifat tidak peduli terhadap pembangunan politik. Sebanyak 10 responden atau 20% responden menunjukan bahwa masyarakat yang memeluk budaya politik kaula memiliki pembangunan politik agak lambat karena masyarakat hanya menyadari akan otoritas pemerintahan. Sebanyak 13 responden atau 26% responden menunjukan bahwa masyarakat yang memeluk budaya politik partisipan pembangunan politiknya ,sangat meningkat karena masyarakat partipatif terhadap objek politik yang dijalani. Sebanyak 20 responden atau responden menunjukan masyarakat yang memeluk budaya politik toleransi pembangunan politiknya berjalan lancar karena masyarakat bersifat netral dan bekerja sama demi meningkatnya pembangunan politik. Sebanyak 5 responden 10% responden menunjukan masyarakat yang memeluk budaya politik militan. pembangunan politiknya tidak berkembang sama sekali karena masyarakatnya bersifat kritis dan selalu menibulkan konflik.

Berdasarkan data penelitian dalam tabel di atas tentang pengaruh budaya politik masyarakat di kecamatan Girian berdasarkan sikap yang di tunjukan terhadap pembangunan politik menunjukan bahwa dari

50 responden yang menjadi sampel ada 2 responden atau 4% responden yang memeluk budaya politik parokial dimana dapat disimpulkan sebagian masyarakat girian memiliki pemikiran parokialisme murni berlangsung dalam system tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang yang sangat minim. sebanyak 10 responden atau 20% responden yang memeluk budaya politik kaula dimana dapat disimpulkan sebagian masyarakat kecamatan girian frekuensi orientasi politiknya tinggi terhadap sistem politik tetapi masih bersifat sif. Sebanyak 13 responden atau 26% responden yang memeluk budaya politik partisipan menunjukan bahwa sebagian masyarakat kecamatan girian anggota masyarakatnya partisipatif terhadap objek politik. 20 responden atau 40% responden yang memeluk budaya politik toleransi dimana dapat disimpulkan bahwa pemikiran budaya politik masyarakat di kecamatan Girian berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari kosensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang. sedangkan sisanya 5 responden atau 10% yang memeluk budaya politik militan dimana dapat disimpulkan bahwa perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari altematif yang terbaik tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan

disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi. Budaya politik toleransi sangat berpengaruh positif terhadap pembangunan politik masyarakat di kecamatan girian dimana dalam pelaksanaan pembangunan politik yang menyangkut hajat hidup bangsa harus benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan demikian akan menimbulkan hubungan yang baik antar masyarakat sedangkan budaya politik militan sangat berpengaruh negatif terhadap pembangunan politik masyarakat di kecamatan Girian karena dapat menimbulkan persoalan , sehingga dapat menyebabkan kekacauan di masyarakat sepenuhnya tentang hak dan kewajibannya. Berbicara mengenai budaya politik masyarakat, adalah sangat penting sekali, sejalan dengan sifat dan watak asli kepribadian yang berlandaskan keberasamaan, dimana sifat kebersamaan yang sudah berakar dalam lapisan masyarakat di Kecamatan Girian. Maka adalah sangat perlu untuk membina semangat yang ada di dalam bentuk yang lebih konkret, yakni penyertaan masyarakat dalam pembangunan politik ini merupakan upaya memajukan kecerdasan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan politik yang menyangkut hajat hidup' bangsa harus benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan demikian akan melahirkan hubungan yang baik dan otomatis akan menyuburkan semangat nasional, sebaliknya pembangunan politik yang tidak sesuai dengan keinginan

masyarakat bangsa akan menimbulkan persoalan, sehingga mengakibatkan disintegrasi bangsa.

Sebagai masyarakat berpendapat bahwa budaya politik merupakan unsur yang penting dalam proses pembentukan mental sebab tanpa budaya dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat diartikan salah. Disamping itu juga budaya politik akan mampu mengantar para masyarakat memasuki peradaban global dan modern dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar nasionalisme. Karena itu arah budaya politik harus senantiasa dimantapkan dalam rangka pembangunan. Persoalan yang dihadapi pada dasarnya bagaimana budaya politik yang dapat dimantapkan wujud kehidupan masyarakat yang bersatu, berdaulat, harus dibina dan dlmantapkan.

Dari uraian diatas yang penting dan perlu senantiasa disadari bahwa apapun yang kita ketahui tentang budaya politik terhadap pembangunan politik benar-benar merupakan tanggung jawab masyarakat.

Berdasarkan data penelitian dalam tabel diatas tentang hubungan antara budaya politik terhadap pembangunan politik dari 50 responden yang menjadi sampel, ada 48 responden atau 96% responden menyatakan berhubungan, sedangkan sisanya 2 responden atau 4% responden menyatakan tidak berhubungan.

Dalam kehidupan budaya politik warga negara saling berintegrasi dengan dijiwai semangat kebersamaan dan keluargaan. Sehingga pelaksanaan

kebebasan dilandasi tanggung jawab sosial dan perwujudan hak asasi manusia diimbangi pengalaman kejiwaan asasinya. Secara hakiki kebebasan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban para warga negara tidak lagi kabur dan tidak menentu, akan tetapi telah diberi arahan pada nilai-nilai budaya politik yang berintikan pada keadilan sosial, persatuanpersaudaraan peradaban kemanusiaan dan kemuliaan keilahian.

Oleh sebab itu sudah sewajarnya dijamin adanya keterbukaan untuk mengatasi, mengkritik, mengembangkan pemikiran atas perwujudan demokrasi agar jangan sampai terjatuh hanya sekedar pantas omong dan sekedar untuk mencari maupun membela kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka yang kebetulan mempunyai kedudukan sosial ekonomi juga jangan hanya dikembangkan kondisi yang memudahkan golongan yang kaya menjadi lebih kuat, menggunakan jabatan terutama untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Namun tidak cukup pula bahwa budaya politik hanya menghasilkan kelimpahan dan kesejahteraan jasmani melulu, sementara kebersamaan tercerai berai, keutuhan kepribadian warga-negaranya mengalami keterpecahan atau kehampaan.

Bagaimanapun budaya politik harus dilihat dari sejauh mana lapisan terkemuka mayarakat kita berhasil mengantarkan munculnya masyarakat demokratis yang semakin nyata atau sama saja mengulang tetap terjatuh dalam kelemahan dan

penyelewengan mana yang dialami pelaksanaan demokrasi sebelumnya.

Melaksanakan budaya politik pada dasarnya membuat berperannya seluruh rakyat untuk terlibat dalam pembangunan politik. Adapun yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat ini adalah para pejabat di Iapangan, mereka inilah khususnya masyarakat untuk dibangkitkan dan digalakkan. Untuk itu setiap pelaksana pembangunan politik dituntut menjamin pelayanan masyarakat diberbagai bidang. Karena bila kemampuan rakyat di hargai dan ditingkatkan, maka budaya politik dapat berkembang untuk memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian yang sudah penulis kemukakan di atas yaitu menyangkut budaya politik dalam pembangunan politik di Kecamatan Girian.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Budaya Politik Terhadap Pembangunan Politik

Sosialisasi politik tidak hanya membentuk dan mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa, tetapi juga memelihara kebudayaan politik dalam bentuk pewarisan kebudayaan itu dari suatu generasi kegenerasi berikutnya. Peranan sosialisasi politik dapat dilihat dari fungsi yang dijalankan oleh sosialisasi politik dalam pembangunan politik. Fungsi itu adalah memelihara, merubah dan menciptakan kebudayaan politik.

Menurut Alfian (1996:244-247), bahwa konsep pembangunan atau

pembaharuan politik mengandung dua pengertian pokok yang saling berkaitan:

- Adanya suatu sistem politik ideal yang ingin dicapai.
- Penilaian bahwa sistem politik yang tengah berlaku masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan oleh karena itu perlu diperbaiki atau diperbaharui.

Kalau sistem politik yang berlaku diletakkan didalam kerangka sistem politik ideal yang diinginkan maka kelemahan-kelemahan itu mungkin akan kelihatan lebih menonjolkan.

Paling kurang akan diketahui akan perbedaan-perbedaannya secara lebih jelas. Sesungguhpun begitu, kesulitan dan kekeliruan sering terjadi, terutama karena kecenderungan untuk mencampur-adukan keduanya, sehingga tidak bisa dibedakan lagi mana yang ideal mana realita. Bilamana kekaburuan antara keduanya sudah sedemikian rupa maka pengertian masyarakat tentang pembangunan atau pembaharuan politik akan menjadi sangat kabur pula dan mungkin sekali kacau.

Jelaslah kiranya bahwa ada atau tidaknya pengertian yang jelas seperti diatas tentang konsep budaya atau pembangunan politik akan amat besar pengaruhnya terhadap proses selanjutnya. Sikap dan budaya politik masyarakat yang terlibat sehari-hari adalah hasil atau akibat dari proses sosialisasi politik yang mereka lalui atau alami.

Selanjutnya itu merupakan pantulan dari kebudayaan politik yang berlaku. Kalau

sikap dan tingkah laku politik yang ada dianggap kurang atau tidak sesuai dengan tuntutan sistem politik yang diinginkan maka jelas perlu diubah. Perubahan itu hanya mungkin terjadi kalau proses sosialisasi politik yang melahirkannya berubah pula. Dari hasil perubahan itu dengan sendirinya akanlah pula kebudayaan politik berm.

Ditinjau dari sini, esensi dari pembangunan atau pembaharuan politik tidak lain adalah usaha untuk menciptakan suatu kebudayaan politik baru.

Perkataan baru disini belum tentu berarti sama sekali meninggalkan kebudayaan politik lama. Sebagaimana kita ketahui, tidak semua nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan politik lama merupakan penghalang terhadap proses pembaharuan politik.

Bukannya tidak mungkin bahwa sebagian dari nilai-nilai yang mendukung suatu kebudayaan politik baru adalah nilai-nilai lama juga. Umpamanya, nilai-nilai tentang kejujuran dan keadilan. Jadi jelaslah bahwa kunci dari pembaharuan kebudayaan politik adalah sosialisasi politik.

C. Pengaruh Budaya Politik Bagi pendidikan Politik Terhadap Pembangunan Politik

Pengaruh budaya politik masyarakat bagi pendidikan politik pada terhadap pembangunan politik hakekatnya merupakan bagian integral dari kerangka pendidikan politik nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional dan merupakan bagian dari pembangunan

nasional sebagai salah satu perwujudan usaha untuk menunjang pembangunan politik yang dilakukan

Pada dasarnya pendidikan politik yang ditujukan pada masyarakat merupakan suatu usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang usaha kebersamaan berbangsa dan bernegara. Maksud yang terkandung dalam pendidikan politik yang memberikan pedoman kepada masyarakat di Kecamatan Girian guna meningkatkan kesadaran kehidupan bersama. Sejalan dan searah dengan cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagai masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan maka perlu dituntut untuk menyadari kewajibannya mempersiapkan diri mampu mengatasi persoalan-persoalan masyarakat melalui penggunaan rasio, ketrampilan, keahlian dan juga melalui keluhuran budi dan integrasi pribadi yang tinggi. Sesuai dengan strategi pembangunan politik masyarakat yang dikembangkan dan diarahkan bagi perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, antara lain perlu diberi pengetahuan politik, dalam hal ini adalah pendidikan politik. Adalah suatu kenyataan setiap masyarakat selalu mempunyai kekuatan sendiri yang dibawa oleh pengaruh lingkungan dan keadaan sosial politik pada saat tertentu.

Oleh karena itu kepada masyarakat harus diberikan pembekalan selain berupa

bimbingan dan pengarahan sesuai prinsip kebersamaan juga pembekalan ideologis, melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Namun yang penting adalah adanya kesadaran, nasionalisme berani maju dan tampil ke depan, dalam melaksanakan tanggung jawab nasional yang lebih besar berdasarkan identitas dan kepercayaan kepada budaya politik yang diarahkan pada pembangunan politik.

Dengan demikian, budaya politik bagi masyarakat pada dasarnya untuk menciptakan suatu masyarakat yang beradab, dimana dalam pergaulan hidup antar sesama sebagai anggota masyarakat terdapat rasa saling hormat menghormati, bantu membantu atau tolong menolong, mengetahui akan hak dan tanggung jawab masing-masing, menjunjung harkat dan martabat bangsa. Ini karena masyarakat telah menyikapi budaya dan moral yang baik.

Ini berarti budaya politik mengandung makna mempertajam nalar masyarakat dengan bekal pedoman-pedoman kehidupan sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang hidupnya tak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan bangsa.

Merupakan budaya yang Iuhur dari budaya politik, yakni kesadaran moral yang tumbuh sejak revolusi kemerdekaan yaitu semangat dan nilai-nilai perjuangan hidup bangsa yang menjawai seluruh masyarakat kita, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang benarnya kepada Tuhan Yang Maha

Esa dan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur di kawasan nusantara yang damai sejahtera dalam pergaulan pembangunan politik, demikianpun harapan kita bagi masyarakat di Kecamatan Girian.

Berdasarkan data penelitian tentang pengaruh budaya politik dalam pendidikan politik masyarakat terhadap pembangunan politik dari 50 resoponden yang menjadi sampel ada 48 responden atau 96% mengatakan baik, sedangkan sisanya 2 responden atau 4% responden menyatakan tidak baik.

Dengan demikian, pengaruh budaya politik dalam pendidikan politik dapat menumbuhkan semangat masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan cara ceramah tentang budaya politik masyarakat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia serta beberapa cara lain yaitu :

1. Bahan-bahan bacaan dari surat kabar, majalah dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan bisa membentuk pendapat umum.
2. Siaran-siaran yang lewat radio maupun televisi.
3. Organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat itu, apakah itu merupakan organisasi yang bersifat sosial, agama maupun bersifat politik.

Dari hal-hal tersebut sangat diharapkan budaya politik benar-benar dilaksanakan dalam pembangunan politik agar budaya politik masyarakat khususnya. Berbicara tentang budaya politik yang paling dominan adalah ideologi Pancasila yang

diartikan sebagai cita-cita atau keinginan suatu bangsa untuk memperoleh kemajuan dan perbaikan disegala bidang demi mencapai kesejahteraan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Secara jelas merupakan pengejawantahan semangat kebangsaan, cara dan pedoman mencapai cita-cita, dasar-dasar dan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pedoman hidup dari bangsa yang bersangkutan yang harus dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya untuk dapat mengetahui perlunya budaya politik bagi suatu bangsa dalam hidup bernegara terlebih dahulu di jelaskan fungsi budaya itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan hidup suatu bangsa yang beraneka ragam, budaya berfungsi sebagai dasar atau kerangka bagi kehidupan bersama, juga sebagai pemberi arah tujuan terhadap pemikiran dan kegiatan bersama dari suatu unsur yang ada dalam suatu masyarakat negara. Oleh karenanya, negara sebagai suatu bentuk organisasi kemasyarakatan dan bersifat nasional hanya akan dapat dikemudikan secara terarah dan efisien apabila ada gambaran yang jelas mengenai hakekat, tujuan dan susunannya.

Mengkaji tentang budaya politik, maka dapatlah dikatakan bahwa gambaran mengenai hakekat, tujuan dasar dan susunan suatu negara itu terkristalisasikan dalam bentuk ideologi, dan ideologi itu adalah yang bersifat nasional. Dengan demikian ideologi nasional merupakan satu kesatuan bagi budaya yaitu budaya politik penting artinya bagi kehidupan suatu bangsa dalam hidup

bernegara ataupun masyarakat. Tanpa budaya politik nasional, kehidupan bangsa yang bersangkutan akan terombang-ambing, sebaliknya dengan budaya politik nasional bangsa yang bersangkutan akan kokoh kuat karena memiliki tujuan yang jelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Budaya politik masyarakat saling berintegrasi dengan dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Sehingga pelaksanaan kebebasan dilandasi tanggung jawab social dan perwujuan hak asasi manusia diimbangi pengalaman kejiwaan asasinya.
2. Pengaruh budaya politik masyarakat pada dasarnya membuat seluruh rakyat untuk terlibat dalam pembangunan politik
3. Budaya politik masyarakat pada dasarnya untuk menciptakan suatu masyarakat yang beradab, dimana dalam pergauluan hidup antar sesama sebagai anggota masyarakat terdapat saling hormat menghormati serta menjunjung harkat dan martabat bangsa

B. Saran

1. dalam kehidupan berbangsa warga Negara saling berintegrasi dengan dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan
2. mengimplementasikan budaya menjadi tanggung jawab lapisan

teerkemuka bangsa kita, aparatur Negara, kaum politik cendekiawan untuk terus menerus melaksanakan, menjabarkan dan meluruskan budaya politik serta pengalaman nilai-nilai luhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Kantaprawira Rusadi. 1988. Politik Internasional Konsep dan Teori. Bandung: Erlangga
- Gaffar, Afan. 1989. Beberapa Aspek Pembangunan Politik, Jakarta; Rajawali
- Irawan, Prasetya.1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta: Pustaka LP3S
- Alfian. 1996. Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Yogyakarta: PPS Ilmu Politik UGM